



TATA KELOLA PARIWISATA KOTA MADIUN DALAM PERSPEKTIF *COLLABORATIVE GOVERNANCE*

Fauzan Algani

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Fauzanalgani2001@gmail.com

Abstract (English)

This study examines the governance of tourism in Madiun City from the perspective of collaborative governance. The issue addressed is the ineffective collaboration among government, community, and private sectors in developing sustainable tourism. The research aims to analyze the characteristics of collaborative governance, including starting condition, facilitative leadership, institutional design, and collaboration processes. A qualitative approach was employed, utilizing interviews, observations, and documentation to gather comprehensive data. The findings indicate that a favorable starting condition, characterized by the commitment of all stakeholders, is crucial for effective collaboration. Facilitative leadership plays a significant role in fostering dialogue among stakeholders, while a transparent institutional design ensures active participation. The collaboration process, which includes face-to-face dialogue and trust-building, leads to positive intermediate outcomes, such as increased tourist visits and improved facilities. Overall, the study highlights that strong collaboration can promote more inclusive and sustainable tourism development in Madiun City, ultimately benefiting the local community and economy.

Article History

Submitted: 4 January 2025
Accepted: 13 January 2025
Published: 14 January 2025

Key Words

Governance, Collaborative Governance, Tourism.

Abstrak (Indonesia)

Penelitian ini mengkaji tata kelola pariwisata di Kota Madiun melalui perspektif collaborative governance. Permasalahan yang diangkat adalah kurangnya kolaborasi efektif antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam pengembangan pariwisata yang berkelanjutan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis karakteristik collaborative governance, yang mencakup starting condition, kepemimpinan fasilitatif, desain institusional, dan proses kolaborasi. Metode yang digunakan meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk mendapatkan data yang mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa starting condition yang baik, ditandai dengan komitmen semua pihak, menjadi fondasi penting dalam kolaborasi. Kepemimpinan fasilitatif berperan dalam memfasilitasi dialog antar stakeholder, sedangkan desain institusional yang transparan memastikan partisipasi aktif. Proses kolaborasi yang efektif, melalui dialog tatap muka dan membangun kepercayaan, menghasilkan intermediate outcomes yang positif, seperti peningkatan kunjungan wisatawan dan pengembangan fasilitas. Dengan demikian, kolaborasi yang kuat dapat mendorong pengembangan pariwisata yang lebih inklusif dan berkelanjutan di Kota Madiun, serta memberikan dampak jangka panjang bagi masyarakat dan perekonomian lokal.

Sejarah Artikel

Submitted: 4 January 2025
Accepted: 13 January 2025
Published: 14 January 2025

Kata Kunci

Governance, Collaborative Governance, Pariwisata



PENDAHULUAN

Pariwisata adalah berbagai kegiatan wisata yang didukung dengan berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah untuk pengunjungnya. Di Indonesia sendiri pariwisata memiliki beraneka ragam jenisnya seperti wisata alam, sosial, budaya maupun buatan. Banyaknya pilihan objek wisata yang ada di kota besar maupun di daerah- daerah saat ini akan mempermudah masyarakat untuk menentukan mana tempat wisata yang ingin dan akan dikunjungi (Prasetyo & Syafrini, 2023). Dengan berkembangnya pariwisata, jika dilihat dari sudut ekonomi, kegiatan pariwisata dapat memberikan sumbangan terhadap penerimaan daerah bersumber dari pajak, retribusi parkir dan karcis atau dapat mendatangkan devisa dari para wisatawan mancanegara yang berkunjung. Adanya pariwisata juga akan menumbuhkan usaha-usaha ekonomi sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat (Sari & De Fretes, 2021). Dengan adanya kegiatan pariwisata diharapkan bisa menjadi peluang untuk membuka lapangan pekerjaan sehingga dapat mengurangi masalah pengangguran yang ada di masyarakat.

Pembangunan pada sektor pariwisata pada saat ini menjadi pokok pembangunan, dimana pembangunan wisata ini menjadi konsep pembangunan pariwisata berkelanjutan. Pembangunan pariwisata berkelanjutan merupakan pengembangan wisata dengan memerhatikan minat wisatawan dan keterlibatan langsung dari masyarakat lokal dengan menjaga kestabilan lingkungan dalam pengelolaan wisata yang berorientasi pada jangka panjang (Damayanti et al., 2022). Mengingat pembangunan pada hakekatnya adalah pemanfaatan sumber daya untuk meningkatkan kesejahteraan, maka pembangunan pariwisata menjadi salah satu usaha untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Pengembangan pemasaran pariwisata merupakan program utama Direktorat Jenderal Pemasaran Pariwisata dengan enam kegiatan pokok, yaitu pengembangan pasar dan informasi pariwisata, peningkatan promosi pariwisata luar negeri, peningkatan promosi pariwisata dalam negeri, peningkatan pencitraan Indonesia, peningkatan minat khusus, konvensi, insentif, dan even, serta dukungan manajemen dan tugas (Nugroho, 2020). Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memanfaatkan sumber daya yang eksotis menjadi tempat pariwisata. Kita tahu bahwa sektor pariwisata sangat berperan pengembangan pemasaran pariwisata lainnya. Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan pariwisata adalah bagaimana upaya untuk memasarkan sumber daya yang sudah tercipta menjadi daerah wisata kepada masyarakat atau konsumen agar mereka mau datang ke tempat wisata.

Jawa timur adalah salah satu fokus pengembangan potensi wisata di Indonesia. Berbagai upaya terus dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mendorong sektor pariwisata agar mampu berkontribusi dalam peningkatan pendapatan asli daerah dan pengentasan kemiskinan di Jawa Timur. Salah satu cara yang ditempuh pemerintah Jawa Timur adalah dengan mengembangkan konsep kepariwisataan yang berbasis kearifan lokal. Dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Jawa Timur sepanjang Januari – Oktober 2018 mencapai 266.217 orang atau naik 33,4% dibandingkan periode yang sama tahun lalu yakni 199.598 kunjungan. Sementara itu selama Oktober saja mencapai 25.845 kunjungan atau naik 26,45% dibandingkan Oktober 2017 dan salah satu kabupaten/kota di Jawa Timur yang memiliki potensi wisata domestik dan mancanegara dengan trend kenaikan kunjungan wisata yang cukup drastic yakni adalah Kota Madiun.

Alasan pemilihan pengembangan pariwisata Kota Madiun menjadi fokus dan lokus penerapan konsep *collaborative governance* adalah kegelisahan penulis melihat realita potensi yang seharusnya mampu dikembangkan untuk kesejahteraan masyarakat Kota Madiun masih belum digarap serius dan dikembangkan oleh Pemerintah Daerah. Ansell dan

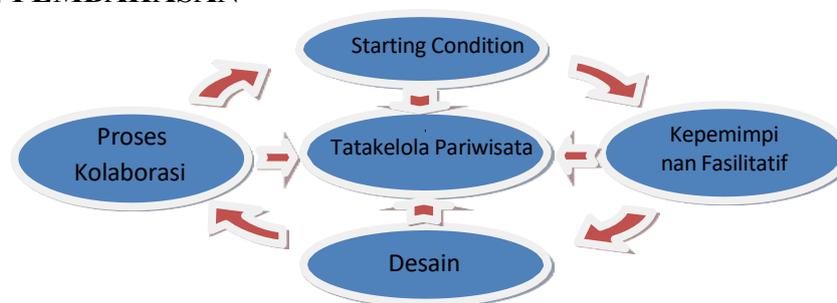


Gash menjelaskan strategi baru dari pemerintahan disebut sebagai pemerintahan kolaboratif atau *collaborative governance*. Bentuk dari pemerintahan yang melibatkan berbagai *stakeholder* secara bersamaan didalam sebuah forum dengan aparatur pemerintah untuk membuat keputusan bersama. (Ansell dan Alison, 2007:543). Ansell dan Gash menjelaskan *collaborative governance* adalah suatu pengaturan pemerintahan dimana satu atau lebih lembaga publik secara langsung melibatkan para pemangku kepentingan nonpemerintah dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang bersifat formal, berorientasi pada konsensus, deliberatif yang bertujuan untuk membuat dan menerapkan kebijakan publik serta mengelola program ataupun aset publik (Afful-Koomson dan Kwabena, 2013:13). Dengan konsep tersebut diharapkan mampu menjadi pemecah masalah dalam pengembangan pariwisata Kota Madiun dan tercipta sinergitas antara masyarakat atau komunitas, swasta, akademisi dan pemerintah dalam perumusan kebijakan pengembangan potensi urban tourism atau potensi wisata lain di Kota Madiun dengan adanya potensi wisata yang beragam dan menarik serta kearifan lokal yang unik, oleh karena itu diharapkan dapat dikelola dengan baik agar mampu menarik wisatawan untuk berkunjung.

METODOLOGI

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata baik tertulis maupun lisan dari perilaku yang diamati. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa penelitian deskriptif kualitatif adalah rangkaian kegiatan penelitian yang digunakan untuk memperoleh data yang bersifat apa adanya sesuai kenyataan pada kondisi tertentu dan hasilnya menekankan pada makna daripada penalaran. (J. Moleong, 2014). Pada penelitian ini dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukan pada Dinas Pariwisata Kota Madiun.

HASIL DAN PEMBAHASAN



1. Kolaborasi dalam *Starting Condition*

Starting condition merupakan tahap kondisi awal collaborative itu dilaksanakan, pada pengelolaan pariwisata Kota Madiun di lombok tahap awal yang dilakukan oleh para stakeholder dalam pengelolaan pariwisata Kota Madiun yaitu dengan menyamakan visi-misi mengenai konsep pariwisata Kota Madiun, penyamaan visi-misi pada tahap awal merupakan sebagai gambaran untuk bersinergi mengembangkan pariwisata Kota Madiun. Kolaborasi dalam pengelolaan pariwisata di Kota Madiun dimulai dari tahap "*starting condition*," yang merupakan kondisi awal di mana para stakeholder menyamakan visi dan misi terkait pengembangan pariwisata. Proses ini penting untuk menciptakan sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam mengembangkan potensi pariwisata Kota Madiun. Menurut Bapak Heru Waskito, Kepala Sub Koordinator Pengelolaan dan Pengembangan Destinasi Wisata, penyamaan visi dan misi ini menjadi gambaran awal untuk bersinergi dalam pengembangan pariwisata.

Partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata di Kota Madiun sangat



signifikan. Strategi yang diterapkan untuk memastikan keterlibatan masyarakat dalam pengembangan pariwisata di Kota Madiun meliputi beberapa pendekatan. Pertama, pemerintah mengadakan forum diskusi dan sosialisasi yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pariwisata bagi perekonomian lokal. Kedua, masyarakat dilibatkan dalam pelatihan untuk meningkatkan keterampilan di bidang pariwisata, seperti pemanduan wisata dan pengelolaan usaha kecil. Ketiga, kegiatan promosi wisata yang melibatkan masyarakat, seperti festival lokal dan event budaya, juga menjadi sarana bagi mereka untuk menunjukkan potensi daerah dan menarik pengunjung. Keterlibatan masyarakat tidak hanya memperkaya pengalaman wisata, tetapi juga memperkuat rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap pengembangan pariwisata.

Secara keseluruhan, kolaborasi dalam "*starting condition*" pada tata kelola pariwisata Kota Madiun menunjukkan bahwa pendekatan inklusif dapat meningkatkan efektivitas pengembangan pariwisata. Dengan melibatkan semua pihak, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat, diharapkan pengembangan pariwisata dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan. Ini sejalan dengan visi Kota Kharismatik Madiun sebagai destinasi wisata yang menarik dan berdaya saing. Dengan demikian, kolaborasi dalam pengelolaan pariwisata di Kota Madiun tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga melibatkan peran aktif masyarakat dan sektor swasta. Hal ini menciptakan sinergi yang kuat dalam pengembangan pariwisata, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada peningkatan pendapatan daerah dan jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Madiun.

2. Kolaborasi dalam Kepemimpinan Fasilitatif

Setelah tahap *starting condition* maka tahap selanjutnya yang dilakukan dalam melakukan pengembangan pariwisata pada collaborative governance yaitu kepemimpinan fasilitatif. Kepemimpinan merupakan hal yang sangat penting dalam pengelolaan pariwisata terlebih pada pariwisata Kota Madiun, kemampuan pemimpin sangat berpengaruh terhadap jalannya proses kolaborasi yang dilakukan oleh para *stakeholder* dalam mengelolapariwisata. Pada kepemimpinan dalam pengelolaan pariwisata harus mempunyai komitmen untuk bersikap transparan, bertanggungjawab dan partisipatif, atau pemimpin yang mempunyai komitmen akuntabel.

Keterlibatan para pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat lokal, dan sektor swasta, sangat krusial dalam menciptakan keberlanjutan pariwisata di Kota Madiun. Dengan melibatkan berbagai pihak dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program pariwisata, pemimpin dapat memastikan bahwa setiap suara didengar dan aspirasi masyarakat dipertimbangkan. Hal ini tidak hanya meningkatkan rasa memiliki di kalangan masyarakat, tetapi juga menciptakan komitmen yang lebih kuat terhadap pengembangan pariwisata yang berkelanjutan. Forum diskusi dan workshop yang melibatkan semua stakeholder menjadi sarana efektif untuk mendengarkan masukan dan menciptakan kebijakan yang relevan, sehingga program-program yang dihasilkan dapat lebih sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.

Keterlibatan aktif pemangku kepentingan juga berkontribusi pada penguatan kapasitas lokal. Dengan memberikan pelatihan dan pendampingan kepada masyarakat dan pelaku usaha, mereka akan lebih siap untuk berkontribusi dalam pengembangan pariwisata. Hal ini menciptakan ekosistem yang saling mendukung, di mana masyarakat tidak hanya menjadi objek wisata, tetapi juga subjek yang berperan aktif dalam pengelolaan dan promosi destinasi wisata. Dengan demikian, keberlanjutan pariwisata di Madiun tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga pada partisipasi dan inisiatif



dari semua pihak yang terlibat.

Tantangan dalam menjaga konsistensi dan keberlanjutan pengembangan pariwisata tetap ada. Keterbatasan sumber daya, baik finansial maupun manusia, sering kali menjadi kendala dalam melaksanakan program-program kolaboratif. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang adaptif dan inovatif dari pemimpin untuk mengatasi tantangan ini. Pemimpin harus mampu menciptakan sinergi yang kuat antara semua pihak untuk mencapai tujuan bersama dalam pengembangan pariwisata yang berkelanjutan. Dalam konteks tersebut, pelatihan dan pendampingan kepada masyarakat dan pelaku usaha juga menjadi penting. Dengan meningkatkan kapasitas mereka, masyarakat dan pelaku usaha akan merasa memiliki tanggung jawab dan peran yang signifikan dalam pengembangan pariwisata. Ini akan menciptakan rasa memiliki yang lebih besar terhadap program-program yang dijalankan, sehingga meningkatkan partisipasi aktif mereka.

Secara keseluruhan, kolaborasi dalam kepemimpinan fasilitatif di Kota Madiun menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan pariwisata sangat bergantung pada kemampuan pemimpin untuk mengarahkan dan memfasilitasi kerjasama antara berbagai pihak. Dengan pendekatan yang inklusif dan partisipatif, pemimpin dapat menciptakan lingkungan yang kondusif untuk inovasi dan pengembangan berkelanjutan.

3. Kolaborasi dalam *Desain institusional (institutional design)*

Setelah tahap *starting condition* dan *kepemimpinan fasilitatif*, maka tahap selanjutnya yang dilakukan dalam pengembangan pariwisata Kota Madiun pada *collaborative governance* yaitu *desain institusional*, *desain institusional* merupakan aturan dasar yang digunakan oleh para pemangku kepentingan untuk melihat legitimasi prosedural dalam melakukan proses kolaborasi, dengan mempunyai aturan yang jelas dan prosesnya terbuka. Meskipun proses kolaborasi sudah cukup terbuka, masih terdapat tantangan yang perlu diatasi. Salah satunya adalah kebutuhan untuk meningkatkan komunikasi yang lebih efektif agar semua informasi terkait pengembangan pariwisata dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Dukungan dari pemerintah dalam bentuk pelatihan dan pendampingan juga sangat penting untuk memberdayakan masyarakat agar mereka dapat berkontribusi secara aktif dalam proses ini. Legitimasi prosedural dalam kolaborasi pengembangan pariwisata di Kota Madiun dinilai melalui partisipasi aktif stakeholder dan umpan balik yang diterima. Proses evaluasi berkala juga dilakukan untuk memastikan bahwa kolaborasi tetap relevan dan efektif. Dalam konteks ini, penting untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap proses kolaborasi yang ada. Meskipun sudah ada upaya untuk melibatkan masyarakat, tantangan dalam komunikasi dan akses informasi tetap perlu diatasi agar semua stakeholder merasa terlibat dan memiliki peran yang berarti dalam pengembangan pariwisata. Dengan demikian, kolaborasi dalam desain institusional dapat menjadi model yang efektif untuk pengelolaan pariwisata yang lebih baik. Secara keseluruhan, kolaborasi dalam desain institusional pada tata kelola pariwisata Kota Madiun menunjukkan potensi yang besar untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan efektivitas pengelolaan. Namun, untuk mencapai hasil yang optimal, diperlukan komitmen dari semua pihak untuk terus berkolaborasi, berkomunikasi, dan berinovasi dalam menghadapi tantangan yang ada. Dengan demikian, pengembangan pariwisata di Kota Madiun dapat berjalan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat.

4. Proses Kolaborasi

Setelah dijabarkan *starting condition*, *kepemimpinan fasilitatif* dan *desain institusional*, maka tahapan selanjutnya yaitu Proses kolaborasi. Pada penjelasan ini dijelaskan bahwa model proses dalam melakukan kolaborasi pengelolaan pariwisata Kota Madiun yang dilakukan dari *collaborative governance* yaitu meliputi berbagai tahapan yakni *Face to pace* (Dialog tatap muka), *Trust Building* (Membangun Kepercayaan), *Comitment to process* (Komitmen terhadap proses), dan *Intermediate outcom*.



a. Face to face (Dialog tatap muka)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberlanjutan dialog tatap muka sangat penting untuk menjaga momentum kolaborasi. Pertemuan yang dilakukan secara berkala dapat membantu memperkuat hubungan antar stakeholder dan memastikan bahwa semua pihak tetap terlibat dalam proses pengembangan pariwisata. Dengan adanya forum rutin, stakeholder dapat terus memperbarui informasi, berbagi pengalaman, dan mengevaluasi kemajuan yang telah dicapai, sehingga kolaborasi tetap relevan dan adaptif terhadap perubahan. Pentingnya dokumentasi hasil dialog tatap muka juga tidak dapat diabaikan. Catatan yang jelas mengenai keputusan yang diambil, masukan yang diberikan, dan langkah-langkah selanjutnya harus disusun dan disebarluaskan kepada semua pihak. Hal tersebut tidak hanya meningkatkan transparansi, tetapi juga memberikan akuntabilitas dalam proses kolaborasi. Dengan cara ini, semua stakeholder dapat melihat bagaimana masukan mereka diintegrasikan ke dalam kebijakan dan program yang dihasilkan.

Secara keseluruhan, proses kolaborasi melalui dialog tatap muka dalam tata kelola pariwisata di Kota Madiun menunjukkan potensi yang besar untuk menciptakan pengembangan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Meskipun terdapat tantangan yang harus diatasi, pendekatan ini dapat memperkuat hubungan antar stakeholder dan menghasilkan keputusan yang lebih baik. Dengan komitmen yang kuat dari semua pihak untuk terus berkolaborasi dan berkomunikasi, pengembangan pariwisata di Kota Madiun dapat mencapai tujuan yang diinginkan dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

b. Trust Building (Membangun Kepercayaan)

Keberlanjutan *trust building* juga menjadi fokus dalam penelitian ini. Ditemukan bahwa kepercayaan yang terbangun tidak bersifat statis, melainkan memerlukan pemeliharaan dan penguatan secara terus-menerus. Pertemuan rutin, umpan balik yang konstruktif, dan evaluasi bersama terhadap program-program yang telah dijalankan menjadi langkah-langkah penting untuk menjaga kepercayaan di antara stakeholder. Dengan cara tersebut, kolaborasi dalam pengembangan pariwisata dapat berlangsung secara efektif dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, proses *trust building* dalam tata kelola pariwisata di Kota Madiun menunjukkan bahwa kepercayaan adalah elemen fundamental yang mendukung kolaborasi yang sukses. Meskipun terdapat tantangan yang harus dihadapi, upaya untuk membangun dan memelihara kepercayaan dapat menghasilkan dampak positif bagi pengembangan pariwisata. Dengan komitmen dari semua pihak untuk terus berkolaborasi dan berkomunikasi, diharapkan pengembangan pariwisata di Kota Madiun dapat mencapai tujuan yang diinginkan dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

c. Commitment to process (Komitmen terhadap proses)

Secara keseluruhan, proses komitmen terhadap proses dalam tata kelola pariwisata di Kota Madiun menunjukkan bahwa komitmen adalah elemen kunci yang mendukung kolaborasi yang sukses. Dengan komitmen yang kuat dari semua pihak untuk terus berkolaborasi dan berkomunikasi, diharapkan pengembangan pariwisata di Kota Madiun dapat mencapai tujuan yang diinginkan dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

d. Intermediate outcom

Intermediate outcomes dari proses kolaborasi ini dapat dilihat dari peningkatan kualitas destinasi wisata dan jumlah kunjungan wisatawan. Dengan adanya kolaborasi yang baik, Kota Madiun berhasil mengembangkan Pahlawan Street Center sebagai salah satu ikon pariwisata yang menarik perhatian banyak pengunjung. Data menunjukkan bahwa



jumlah wisatawan yang datang ke Kota Madiun meningkat signifikan, yang berdampak positif pada pendapatan daerah dan perekonomian lokal. Ini menunjukkan bahwa hasil dari kolaborasi tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga memberikan dampak jangka panjang bagi masyarakat.

Tantangan dalam proses kolaborasi tetap ada, seperti kebutuhan akan sarana transportasi yang terintegrasi dan promosi yang lebih masif. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak untuk terus berkomunikasi dan berkolaborasi dalam mencari solusi atas tantangan yang ada. Dengan membangun kepercayaan dan komitmen yang kuat, diharapkan kolaborasi dalam tata kelola pariwisata di Kota Madiun dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan daerah. Secara keseluruhan, proses kolaborasi dalam tata kelola pariwisata di Kota Madiun menunjukkan potensi yang besar untuk pengembangan sektor pariwisata yang berkelanjutan. Melalui dialog tatap muka, membangun kepercayaan, dan komitmen terhadap proses, intermediate outcomes yang diharapkan dapat tercapai. Dengan demikian, Kota Madiun dapat terus bertransformasi menjadi destinasi wisata yang menarik dan berdaya saing di tingkat nasional maupun internasional.

SIMPULAN

Tata kelola kolaborasi dalam pengembangan pariwisata di Kota Madiun telah menunjukkan kemajuan yang cukup baik, yang dapat dilihat dari beberapa aspek kunci. Pertama, proses kolaborasi dimulai dengan kondisi awal yang positif, di mana terdapat kesadaran yang tinggi akan pentingnya kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Kesadaran ini menjadi fondasi yang kuat untuk pengembangan pariwisata yang berkelanjutan. Selanjutnya, kepemimpinan fasilitatif memainkan peran penting dalam mendorong partisipasi aktif dari semua stakeholder. Pemimpin yang mampu membangun kepercayaan dan komitmen di antara pihak-pihak terkait akan meningkatkan efektivitas kolaborasi.

Desain institusional yang baik juga menjadi faktor penentu, di mana transparansi, partisipasi, dan tanggung jawab bersama diutamakan. Hal ini memastikan bahwa semua pihak merasa terlibat dan memiliki peran dalam pengembangan pariwisata, serta memungkinkan evaluasi dan penyesuaian terhadap kebutuhan masyarakat. Proses kolaborasi itu sendiri melibatkan dialog tatap muka yang konstruktif, membangun kepercayaan, dan komitmen terhadap proses, yang pada gilirannya menghasilkan hasil antara yang positif. Meskipun terdapat tantangan, seperti kebutuhan akan sarana transportasi yang terintegrasi dan promosi yang lebih masif, kolaborasi ini menunjukkan potensi besar untuk meningkatkan daya tarik wisata dan perekonomian lokal. Secara keseluruhan, tata kelola kolaborasi dalam pengembangan pariwisata di Kota Madiun menunjukkan hasil yang positif dan berkelanjutan, dengan harapan dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- AASA, W. (1967). Pariwisata Alam dan Budaya. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 5–24.
- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Syakir Media Press.
- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974–980. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>





- Ahmad, F., Arman, A., & Dunggio, S. (2021). Peran Dinas Pariwisata Kota Gorontalo Dalam pengembangan Pariwisata Dimasa Pandemi Covid-19. *Provider Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 41–56. <https://doi.org/10.59713/projip.v1i1.39>
- Azwar, H., Hanafiah, M. H., Ghani, A. A., Azinuddin, M., & Shariffuddin, N. S. M. (2023). Community-Based Tourism (Cbt) Moving Forward: Penta Helix Development Strategy Through Community Local Wisdom Empowerment. *Planning Malaysia*, 21(1), 72–88. <https://doi.org/10.21837/PM.V21I25.1225>
- Beliu, J. J., & Fina, Y. N. (2019). Pengembangan Pariwisata Di Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Conference on Public Administration ...*, 01, 139–152. <http://proceedings.undip.ac.id/index.php/copas/article/view/24>
- Dadan, S., & Widodo, B. (2020). Revitalisasi dan Konservasi Permainan Anak Tradisional Sebagai Strategi Pengembangan Pariwisata Berbasis Kearifan Lokal Di Kabupaten Banyumas. *Gulawentah: Jurnal Studi Sosial*, 5(2), 107. <https://doi.org/10.25273/gulawentah.v5i2.6853>
- Damayanti, E., Ahmad, A., & Ajar, S. B. (2022). Partisipasi Masyarakat Dalam Upaya Konservasi Dan Pengembangan Pariwisata Gumuk Pasir Di Desa Parangtritis Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul Tahun 2020. *Indonesian Journal of Environment and Disaster*, 1(2), 35–43. <https://doi.org/10.20961/ijed.v1i2.270>
- Darmayanti, P. W., & Oka, I. M. D. (2020). Implikasi Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat Bagi Masyarakat Di Desa Bongan. *Jurnal Ilmiah Hospitality Management*, 10(2), 142–150. <https://doi.org/10.22334/jihm.v10i2.167>
- Djabbari, M. H., Alwi, A., & Thamrin, S. H. (2021). Implementasi Public Private Partnership dalam Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Toraja Utara. *JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik)*, 1, 1–13. <https://doi.org/10.31947/jakpp.v7i1.13203>
- Elia, A., & Dkk. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Pustaka Ilmu.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>
- Haryoko, S., Bahartiar, & Arwadi, F. (2020). *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik, & Prosedur Analisis)*.
- Hasibuan, S., Rodliyah, I., Thalhah, S. Z., Ratnaningsih, P. W., & E, A. A. M. S. (2022). Media penelitian kualitatif. In *Jurnal EQUILIBRIUM* (Vol. 5, Issue January).
- History, A. (2023). *Collaborative Governance for Rural Development : an Analysis of Tourism Village in Indonesia (Case Study : Code Cokrodingratan Village)*. 1(9), 1–11.
- Kurniadi, & Suryadi, S. (2021). *Collaborative-Governance: Teori dan*



- Kusuma, V. F., & Wahyudi, K. E. (2023). Collaborative Governance Dalam Pengembangan Wisata Kampung Pecinan Kecamatan Simokerto Kota Surabaya. *Cakrawala Repositori IMWI*, 6(6), 2454–2465. <https://doi.org/10.52851/cakrawala.v6i6.561>
- Lestari, T. L., Rosyadi, S., & Tobirin, T. (2022). Collaborative Governance Dalam Pelayanan Publik. *JDKP Jurnal Desentralisasi Dan Kebijakan Publik*, 3(1), 363–375. <https://doi.org/10.30656/jdkp.v3i1.3938>
- Liu, J., Yu, Y., Chen, P., Chen, B. Y., Chen, L., & Chen, R. (2023). Facilitating urban tourism governance with crowdsourced big data: A framework based on Shenzhen and Jiangmen, China. *International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation*, 124(August), 103509. <https://doi.org/10.1016/j.jag.2023.103509>
- Lukiarti, M. M., & Widodo, A. (2021). *Strategi Promosi Pariwisata Oleh Yayasan Lasem Heritage Pada Masa Pandemi Covid-19*. 142–154.
- Mashur, D., Mayarni, Handoko, T., & Rafi, M. (2023). GLOBAL LITERATURE TREND ON COLLABORATIVE GOVERNANCE (Scientometric Analysis in the Social Sciences Discipline). *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 11(1), 101–116. <https://doi.org/10.26811/peuradeun.v11i1.829>
- Nggini, Y. H. (2019). Analisis Swot (Strength, Weaknes, Opportunity, Threats) Terhadap Kebijakan Pengembangan Pariwisata Provinsi Bali. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 3(1), 141. <https://doi.org/10.38043/jids.v3i1.1739>
- Noor, M. (2022). *collaborative governance suatu tinjauan teoritis dan praktik* (M. R. F. dan F. Z. Yopiannor (ed.); Muhammad N). BILDUNG.
- Nugroho. (2020). Beberapa Masalah Dalam Pengembangan Sektor Pariwisata Di Indonesia. *Jurnal Pariwisata*, 7(2), 124–131.
- Patadjenu, S., Sondang Silitonga, M., & Asropi, A. (2023). TATA KELOLA KOLABORATIF PENGEMBANGAN PARIWISATA LIKUPANG, KABUPATEN MINAHASA UTARA Tourism Development Collaborative Governance of Likupang, North Minahasa Regency. *Kepariwisata Indonesia*, 17(1), 23–48.
- Pitana, I. G., & Diarta, I. K. S. (2009). PENGANTAR_ILMU_PARIWISATA.pdf. In *Andi* (pp. 1–221).
- Prasetyo, D. A., & Syafrini, D. (2023). Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Pariwisata Budaya di Perkampungan Adat Nagari Sijunjung Sumatera Barat. *Jurnal Perspektif*, 6(1), 47–57. <https://doi.org/10.24036/perspektif.v6i1.721>
- Sahir, S. H. (2022). *Metodologi penelitian*.



- Salim, & Syahrums. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif Konsep dan Aplikasi dalam Ilmu Sosial, Keagamaan dan Pendidikan* (pp. 141–142).
- Sari, S. N., & De Fretes, M. D. (2021). Pengembangan Pariwisata Dalam Upaya Pembangunan Ekonomi Masyarakat Di Pulau Pari Kepulauan Seribu. *Abiwara : Jurnal Vokasi Administrasi Bisnis*, 2(2), 6–12. <https://doi.org/10.31334/abiwara.v1i2.1384>
- Satrio Wibowo, M., & Arviana Belia, L. (2023). Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan *Jurnal Manajemen Perhotelan Dan Pariwisata*, 6(1), 25–32.
- Setianingsih, E. L., Herawati, A. R., & Hariani, D. (2022). *Penta Helix Model Tourism Development in*. 3(13), 2221–2226.
- Sugiyono. (2013). *Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian*. 1, 1–9.
- Sukirman. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Pengantar*. Penerbit Aksara Timur.
- Swesti, W., Soeprihanto, J., & Widiyastuti, D. (2020). Model Pengembangan Pariwisata Kreatif untuk Mencapai Keberlanjutan di Desa Wisata Kasongan. *Jurnal Kawistara*, 10(3), 295. <https://doi.org/10.22146/kawistara.44157>
- Syarifuddin, D. (2023). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Pariwisata di Kampung Wisata Cireundeu, Cimahi, Jawa Barat. *JURNAL PARADIGMA : Journal of Sociology Research and Education*, 4(2), 141–157. <https://doi.org/10.53682/jpjsre.v4i2.8024>
- Widowati, S., Ginaya, G., & Triyuni, N. N. (2019). Penta helix model to develop ecotourism: Empowering the Community for Economic and Ecological Sustainability. *International Journal of Social Sciences and Humanities*, 3(2), 31–46.